

Atasi Banjir dengan Kerja Sama Lintas Wilayah

Diperlukan kerja sama lintas daerah untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Pasalnya, jika penanganan hanya dilakukan Pemerintah Kota Bekasi, tapi Kabupaten Bogor tidak melakukannya, maka Pemerintah Kota Bekasi menjadi sia-sia sebab hulu Kali Bekasi berada di wilayah Kabupaten Bogor.

"Harus ada kerja sama yang baik dengan Jakarta, Bogor, dan Kabupaten Bekasi karena pembangunan yang dilakukan di daerah mereka sangat berpengaruh dengan upaya pencegahan banjir yang dilakukan Kota Bekasi," ujar anggota Komisi B Agus Rohadi, di Bekasi, Minggu (9/10).

Selain dengan Pemda Bogor, kerja sama serupa harus dilakukan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kerja sama di antaranya dengan upaya pengalihan aliran kali yang selalu meluap ke Kanal Banjir Timur," katanya.

Mekanisme kerja sama, kata Agus, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Bekasi, tapi yang pasti, tindakan nyata harus segera dilakukan mengingat saat ini telah masuk musim hujan.

Untuk membicarakan berbagai hal terkait dengan upaya antisipasi banjir, Komisi B, dalam waktu dekat ini, juga akan memanggil pejabat Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi. "Pemanggilan itu juga dilakukan karena kita kecewa belum ada program yang jelas dari dinas itu untuk upaya di 2012 nanti," kata Agus.

Tubagus menambahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus membekali setiap birokrat, terutama aparat kelurahan, dengan pengetahuan yang luas terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Pasalnya, birokrat kelurahan menjadi petugas terdepan dalam menerapkan isi dari peraturan daerah.

Tigor Morris Marpaung menjelaskan fungsi RTH dalam konsep kota modern, yakni menciptakan ruang sosialisasi baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembuatan taman-taman kota harus menjadi prioritas utama bagi pemimpin di DKI Jakarta. "Adanya taman-taman kota yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat merupakan wajah sebuah kota modern yang pro lingkungan," jelasnya.